

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021**

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021



Jl. Pelabuhan Sungai Jang No. 38 Tanjungpinang
www.kepri.litbang.pertanian.go.id

KATA PENGANTAR

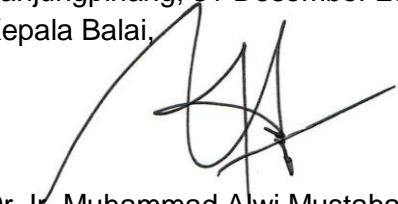
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tanjungpinang, 31 Desember 2021
Kepala Balai,



Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si
NIP. 196807221994031003

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Tak Berwujud

C.3.2. Aset Lain-lain

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

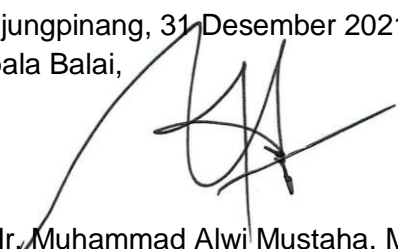
- D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi
 - E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 31 Desember 2021
Kepala Balai,



Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si
NIP. 196807221994031003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp630.000,00 atau mencapai 17,39% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp9.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp4.496.630.368,00 atau mencapai 94,86% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.740.096.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp14.521.469.590,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp133.182.662,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp14.388.286.928,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; Kewajiban jangka pendek sebesar Rp2.076.409,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.076.409,00 dan Rp14.521.469.590,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp840.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 5.219.969.321,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-5.219.969.321,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp725.000,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-5.218.404.321,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp15.242.732,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-5.218.404.321,00

kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.495.065.368,00 dan penurunan Ekuitas sebesar Rp-723.338.953 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp14.519.393.181,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021			31 Desember 2020
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	9.000.000,00	1.565.000,00	17,39	630.000,00
Jumlah Pendapatan		9.000.000,00	1.565.000,00	17,39	630.000,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	2.065.200.000,00	1.903.711.453,00	92,18	1.953.326.829,00
Belanja Barang	B.4.	2.666.967.000,00	2.592.918.915,00	97,22	2.968.619.485,00
Belanja Modal	B.5.	7.929.000,00	0,00	0,00	201.191.881,00
Jumlah Belanja		4.740.096.000,00	4.496.630.368,00	94,86	5.123.138.195,00

II. NERACA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	133.182.662,00	284.177.160,00
Jumlah Aset Lancar		133.182.662,00	284.177.160,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	4.568.076.000,00	4.568.076.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	4.068.136.461,00	4.136.066.461,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	9.719.728.860,00	9.719.728.860,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	105.017.825,00	105.017.825,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	22.280.000,00	22.280.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-4.094.952.218,00	-3.588.357.912,00
Jumlah Aset Tetap		14.388.286.928,00	14.962.811.234,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	6.115.000,00	6.115.000,00
Aset Lain-lain	C.3.2.	79.190.000,00	11.260.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	(85.305.000,00)	-16.671.250,00
Jumlah Aset Lainnya		0,00	703.750,00
Jumlah Aset		14.521.469.590,00	15.247.692.144,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	3.274.432,00	4.960.010,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.274.432,00	4.960.010,00
Jumlah Kewajiban		3.274.432,00	4.960.010,00
Ekuitas			
Jumlah Ekuitas	C.5.	14.519.695.158,00	15.242.732.134,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		14.519.695.158,00	15.247.692.144,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	840.000,00	630.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		840.000,00	630.000,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	1.901.808.002,00	1.956.178.631,00
Beban Persediaan	D.3.	187.451.298,00	686.239.640,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	1.663.976.421,00	1.309.082.614,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	267.362.103,00	269.871.256,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	623.977.491,00	425.174.515,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	575.228.056,00	630.026.694,00
JUMLAH BEBAN		5.219.969.321,00	5.276.573.350,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-5.219.969.321,00	-5.275.943.350,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	2.225.000,00	221.400,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	0,00	20.307.500,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		2.225.000,00	-20.086.100,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-5.218.102.344,00	-5.296.029.450,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS AWAL	E.1.	15.242.732.134,00	14.286.981.619,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-5.218.102.344,00	-5.296.029.450,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	1.129.271.770,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1.	0,00	21.669.375,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2.	0,00	1.163.360.000,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.3.	0,00	-55.757.605,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	4.495.065.368,00	5.122.508.195,00
PENURUNAN EKUITAS	E.4.1	723.036.976,00	955.750.515,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	14.519.695.158,00	15.242.732.134,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian adalah unit pelaksana teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) di daerah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 19/Permentan/OT.020/05/2017.

BPTP Kepulauan Riau merupakan fungsi unit kerja Eselon III yang secara struktural adalah salah satu unit kerja di lingkup Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP). Dalam pelaksanaan kegiatan, secara struktural Kepala Balai dibantu oleh Pejabat Eselon IV.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan. Menjadi suatu unit kerja Badan Litbang Pertanian penghasil inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi yang handal sesuai dengan dinamika pembangunan pertanian di Kepulauan Riau.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	8.340.000,00	8.340.000,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	660.000,00	660.000,00
Jumlah Pendapatan	9.000.000,00	9.000.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.028.200.000,00	2.065.200.000,00
Belanja Barang Operasional	550.500.000,00	559.500.000,00
Belanja Barang Non Operasional	2.079.044.000,00	921.555.000,00
Belanja Barang Persediaan	197.500.000,00	36.792.000,00
Belanja Jasa	525.600.000,00	253.600.000,00
Belanja Pemeliharaan	253.500.000,00	267.500.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	647.000.000,00	628.020.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.929.000,00	7.929.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	0
Jumlah Belanja	6.489.273.000,00	4.740.069.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.565.000,00 atau mencapai 17,38% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp9.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	8.295.000,00	840.000,00	10,07
Pendapatan Lain-Lain	0,00	725.000,00	
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	660.000,00	0,00	
Jumlah	9.000.000,0	1.565.000,00	17,39

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami penurunan sebesar -12,50% dibandingkan TA 2010. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	840.000,00	630.000,00	33,33
Pendapatan Lain-lain	2.225.000,00	221.400,00	227,46
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.065.500,00	630.000,00	248,41

Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp840.000,00 merupakan sewa rumah dinas oleh pegawai BPTP Kepri sebanyak dua rumah dinas dan pengembalian belanja pegawai pada pendapatan lain-lain sebesar Rp 3.065.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Rincian Pendapatan dari sewa rumah dinas

Nama Pegawai	Beban Sewa	Jumlah Bulan	Total
R. Catur Prasetyono	35.000,00	12	420.000,00
Jonri suhendra sitompul	35.000,00	12	420.000,00
Jumlah		24	840.000,00

b. Rincian Pendapatan lain-lain

Nama Pegawai	Pegembalain Belanja	Jumlah Bulan	Total
Ahmad Misbah	185.000,00	1	185.000,00
Irma Oktavia	180.000,00	1	180.000,00
Nikodemus Gultom	180.000,00	1	180.000,00
Faisal Kurnia Harahap	180.000,00	1	180.000,00
Gabah Konsumsi	5000,00	300	1.500.000,0
Jumlah		4	2.225.000,00

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp4.497.895.532,00 atau 94,68% dari anggaran belanja sebesar Rp4.740.096.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021

Uraian	2021			
	Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai		2.065.200.000,00	1.904.976.617,00	92,24
Belanja Barang		2.666.967.000,00	2.592.918.915,00	97,22
Belanja Modal		7.929.000,00	0,00	0
Total Belanja Kotor		4.740.096.000,00	4.497.895.532,00	94.68
Pengembalian Belanja			1.255.164,00	0.00
Total Belanja		4.740.096.000,00	4.497.895.532,00	94.89

Dibandingkan dengan Tahun 2020 Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar -12,23% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya refocusing anggaran di awal tahun sehingga proses belanja Terkendala
2. Tidak ada pagu belanja modal pada tahun 2021
3. Penambahan anggaran setelah refocusing untuk kegiatan Penanganan Ekonomi Nasional (PEN) pada bulan Februari.
4. Adanya Pegawai yang Mutasi, Pensiun dan Tugas Belajar
5. Adanya Kekosongan Gaji Kepala Balai Selama 2 Bulan

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Belanja Pegawai	1.904.976.617,00	1.953.326.829,00	-2,54
Belanja Barang	2.592.918.915,00	2.968.619.485,00	-12,66
Belanja Modal	0,00	201.191.881,00	-100
Total Belanja	4.497.895.532,00	5.123.138.195,00	-12,23

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.903.711.453,00 dan Rp1.953.326.829,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 7,41% dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar 2,54 % dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Terdapat Mutasi 1 (satu) orang pegawai pada bulan Juli 2020
2. Adanya 1 (satu) pegawai Pensiun pada bulan Mei 2020
3. Adanya 3 (tiga) Petugas Belajar dan 1 orang Berhenti Fungsional per Maret 2021
4. Terdapat penambahan pegawai CPNS sebanyak satu orang
5. Pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional penyuluh sebanyak satu orang sejak bulan April dan pengangkatan jabatan fungsional peneliti satu orang sejak Januari
6. Terdapat pegawai naik pangkat dari II.a ke II.b, dari III.a ke III.b
7. Terdapat pegawai dengan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) sebanyak 8 orang
8. Adanya Perpindahan Kepala Balai tanpa adanya perpindahan gaji dari Satker lama

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.904.976.617,00	1.954.438.217,00	-2,53
Jumlah Belanja Kotor	1.904.976.617,00	1.954.438.217,00	-2,53
Pengembalian Belanja Pegawai	-1.265.164,00	-1.111.388,00	13,84
Jumlah Belanja	1.903.711.453,00	1.953.326.829,00	-2,54

Nilai belanja pegawai di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp 1.499.698.229,00 sedangkan nilai beban pegawai di Laporan Operasional (LO) sebesar Rp 1.495.884.319,00, terdapat selisih sebesar Rp 3.813.910,00. Selisih tersebut merupakan pengembalian belanja Tahun Anggaran Berjalan dan Pembayaran belanja pegawai tahun 2020 yang belum terbayarkan dan sudah dicatat dalam transaksi Jurnal Penyesuaian di SAIBA. Rincian selisih tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Selisih LRA - LO		Rincian Nilai	Rincian Uraian	Keterangan
Belanja LRA	1.903.711.453,00	2.093.860	Gaji Pegawai yang belum terbayarkan pada tahun 2020	Ega Parpy Lestari, A.Md
Beban LO	1.899.897.543,00	1.720.050	Tunjangan Fungsional Pegawai yang belum terbayarkan pada tahun 2020	Khoiru Rizky Rambe, SE., M.Si Faisal Kurnia Harahap Irma Oktavia, A.Md Nikodemus Gultom, A.Md
Selisih	3.813.910			
Total		3.813.910		

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 30 Desember 2021 dan 30 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.592.918.915,00 dan Rp2.968.619.485,00. Realisasi belanja barang TA 2021 mengalami penurunan sebesar -12,66% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya refocusing anggaran di awal tahun pada belanja barang yang semula sebesar Rp2.503.144.000,00 menjadi 1.367.523.000,00 sehingga berdampak pada jumlah nilai belanja barang pada Tahun 2021

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	543.048.740,00	849.342.960,00	-36,06
Belanja Barang Non Operasional	885.861.907,00	228.614.312,00	287,49
Belanja Barang Persediaan	36.456.800,00	968.191.200,00	-96,23
Belanja Jasa	236.211.874,00	230.607.742,00	2,43
Belanja Pemeliharaan	267.362.103,00	266.688.756,00	0,25
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	623.977.491,00	427.410.515,00	45,99
Jumlah Belanja Kotor	2.592.918.915,00	2.970.855.485,00	-12,72
Pengembalian Belanja Barang	0,00	-2.236.000,00	-100
Jumlah Belanja	2.592.918.915,00	2.968.619.485,00	-12,66

Satuan Kerja (Satker) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau menerima tambahan anggaran pada revisi kedua di bulan Maret setelah terjadinya refocusing pada revisi pertama di bulan Februari. Tambahan anggaran tersebut merupakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp.700.000.000 dengan nama kegiatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian dengan sub kegiatan Hilirisasi Teknologi dan Inovasi Balitbangtan. Sampai pada semester pertama ini, anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 670.838.097,00 dengan rincian realisasi terlampir.

Uraian kegiatan yang dimuat dalam program PEN tersebut dan hasil yang sudah dilaksanakan sebagai berikut:

Program	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan
Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian (PEN) - Hilirisasi Teknologi dan Inovasi Balitbangtan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan implementasi teknologi sayuran spesifik lokasi di Kota Tanjungpinang; 2. Kegiatan implementasi teknologi sayuran spesifik lokasi di Kota Batam; 3. Kegiatan implementasi teknologi sayuran spesifik lokasi di Kabupaten Bintan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temu Tugas Peneliti dan Penyuluh telah dilaksanakan pada 4 Mei 2021 secara virtual dan nonvirtual 2. Bimtek Hilirisasi Inovasi Teknologi Balitbangtan dengan Topik Teknologi Proliga Cabai dan Penanganan Pascapanen Sayuran telah dilaksanakan

	<p>4. Temu Tugas dan Bimtek untuk Mendukung Pengembangan Hortikultura</p>	<p>pada 16 September 2021</p> <p>3. Bimtek Hilirisasi Inovasi Teknologi Balitbangtan dengan Topik Pengelolaan Limbah Ternak telah dilaksanakan pada 17 September 2021</p> <p>4. Pengadaan bahan untuk pelaksanaan kegiatan berupa implementasi teknologi sayuran spesifik lokasi di Kota Tanjungpinang, Kota Batam, dan Kabupaten Bintan sedang berproses.</p> <p>5. Bimtek hilirisasi teknologi dan inovasi Balitbangtan pada tanggal 12 dan 17 Agustus</p>
--	--	---

Penggunaan akun belanja Covid-19 selain kegiatan Hilirisasi pada Program PEN, juga terdapat pada kegiatan Layanan Perkantoran bagian Keperluan Sehari-hari Perkantoran senilai Rp36.000.000,00. Akun Covid-19 tersebut merupakan akun 522192 - Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 yang diperuntukkan untuk Belanja Jasa Rapid Antigen atau swab PCR seluruh pegawai kantor. Realisasi sampai pada 30 Desember 2021 sebesar Rp35.979.000,00. Rincian Belanja Tersebut terlampir dilampiran Laporan Keuangan Semester II TA 2021.

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 30 Desember 2021 dan 30 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 201.191.881,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar -100,00% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Tidak terdapat pagu belanja Modal dari Rupiah Murni pada anggaran tahun 2021 sehingga tidak ada realisasi.
2. Pagu belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.7.929.000,00 tersebut berasal dari akun PNBPN atau penggunaan sebagian dana PNBPN, terhubung sampai semester II BPTP Kepri belum memperoleh PNBPN sehingga pagu tersebut belum terealisasi.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	201.191.881,00	
Jumlah Belanja Kotor	0,00	201.191.881,00	
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	
Jumlah Belanja	0,00	201.191.881,00	

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar RP0,00 dan Rp160.000.000,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per Desember 2021

Uraian	30 Desember 2021
Saldo UP	0,00
Kuitansi UP yang belum di SP2D kan	0,00
Jumlah	0,00

C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp216.255.742,00 dan Rp216.255.742,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan

maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 30 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	30 Desember 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	5.287.900,00	7.332.900,00
Bahan Baku	127.894.762,00	276.844.260,00
Jumlah	133.182.662,00	284.177.160,00

Perolehan persediaan pada tahun 2021 sebesar Rp36.456.80,00 merupakan persediaan dalam bentuk Alat Tulis Komputer (ATK). Saldo awal persediaan tahun 2021 terdiri Barang Konsumsi Rp 7.332.900,00 dan Bahan Baku Rp 276.844.260,00. Pemakaian atau beban selama tahun 2021 sebesar Rp187.451.298 sehingga saldo persediaan pada Semester II Tahun 2021 sebagaimana dalam tabel di atas.

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.568.076.000,00 dan Rp4.568.076.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 4.068.136.461,00 dan Rp4.136.066.461,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	4.136.066.461,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-67.930.000,00
Saldo per 30 Desember 2021	4.068.136.461,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-3.189.749.768,00
Nilai Buku per 30 Desember 2021	878.386.693,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Mutasi kurang senilai Rp 67.930.000,00 merupakan aset yang mengalami perubahan kondisi barang menjadi rusak berat dan tidak digunakan dalam operasional kantor.

No	NUP	Nama Barang	NUP	Nilai
1	3020103999	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya	1	27.000.000
2	3100102002	Laptop	10	15.400.000
3	3050105017	Mesin Absensi	1	7.250.000
4	3050203003	Mesin Pemotong Rumput	1	2.500.000
5	3050105039	Display	1	4.290.000
6	3050105039	Display	2	6.490.000
7	3100102001	P.C Unit	2	5.000.000
Total				67.930.000

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPTP-Balitbangtan Kepri per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 9.719.728.860,00 dan Rp 9.719.728.860,00.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPTP-Balitbangtan Kepri per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 105.017.825,00 dan Rp 105.017.825,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPTP-Balitbangtan Kepri per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 22.280.000,00 dan Rp 22.280.000,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPTP-Balitbangtan Kepri per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-4.094.952.218,00 dan Rp-3.588.357.912,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	4.068.136.461,00	-3.189.749.768,00	878.386.693,00
2.	Gedung dan Bangunan	9.719.728.860,00	-893.583.413,00	8.826.145.447,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	105.017.825,00	- 11.619.037,00	93.398.788,00
4.	Aset Tetap Lainnya	22.280.000,00	0,00	22.280.000,00
Akumulasi Penyusutan		13.915.163.146,00	-4.094.952.218,00	9.820.210.928,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 6.115.000,00 dan Rp 6.115.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	6.115.000,00
Jumlah	6.115.000,00

Per 31 Desember Aset tak berwujud berubah kondisi menjadi rusak berat, ini sesuai dengan rekomendasi Itjen pada Pelaporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021 untuk segera melakukan penghapusan pada Aset Tak Berwujud karena sudah tidak memiliki nilai manfaat operasional.

C.3.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BPTP-Balitbangtan Kepri per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 79.190.000,00 dan Rp 11.260.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPTP-Balitbangtan Kepri serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	11.260.000,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	67.930.000,00
Saldo per 31 Desember 2021	79.190.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-79.190.000,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	0,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

1. Mutasi tambah ke aset lainnya merupakan aset yang mengalami perubahan kondisi menjadi rusak berat dan tidak digunakan dalam operasional kantor.

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPTP-Balitbangtan Kepri per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-79.190.000,00 dan Rp -6.115.000,00 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontrak akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	6.115.000,00	-6.115.000,00	0,00
2.	Aset Lain-lain	79.190.000,00	-79.190.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		85.305.000,00	-85.305.000,00	0,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.076.409,00 dan Rp Rp4.960.010,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	1.910.459,00	3.813.910,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	165.950,00	1.146.100,00
Jumlah	2.076.409,00	4.960.010,00

Rincian Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

1. Kekurangan gaji pokok pegawai tahun 2021 atas nama Irma Oktavia, Nikodemus Gultom, dan Ega Parpy Lestari
2. Beban langganan Air bulan Desember tahun 2021

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp14.519.393.1891,00 dan Rp 15.242.732.134,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas..

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp630.000,00 dan Rp350.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	840.000,00	630.000,00	33,33
Jumlah	840.000,00	630.000,00	80,00

Pendapatan tersebut merupakan biaya atau sewa rumah dinas yang dibebankan kepada pegawai yang menempati rumah dinas tersebut. Terdapat dua pegawai yang menempati dua rumah dinas, masing-masing pegawai dibebankan biaya sebesar Rp35.000,00 setiap bulannya. Sehingga sampai pada semester I tahun 2021 diperoleh sewa rumah dinas sebesar $(2 \times 2 \times 12) \times \text{Rp}.35.000,00 = \text{Rp } 840.000,00$

No	Nama Pegawai	Sumber Pendapatan	Jumlah Bulan	Nilai per Bulan	Total
1	R. Catur Prasetyono	Sewa Rumah Dinas	12	35.000	420.000
2	Jonri Suhendra	Sewa Rumah Dinas	12	35.000	420.000
Jumlah			18	35.000	840.000

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.956.178.631,00 dan Rp1.899.897.543,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.229.367.200,00	1.255.392.580,00	-2,23
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.949,00	19.345,00	-2,04
Beban Tunj. Anak PNS	24.162.540,00	25.103.342,00	-3,74
Beban Tunj. Beras PNS	69.668.040,00	62.139.300,00	11,21
Beban Tunj. Fungsional PNS	280.680.000,00	267.300.050,00	4,36
Beban Tunj. PPh PNS	8.932.864,00	9.192.500,00	-2,82
Beban Tunj. Struktural PNS	22.680.000,00	23.940.000,00	-5,26
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	68.728.860,00	76.505.514,00	-10,16
Beban Tunjangan Umum PNS	21.545.000,00	32.560.000,00	-33,82
Beban Uang Makan PNS	177.928.000,00	204.026.000,00	-12,79
Jumlah	1.903.711.453,00	1.956.178.631,00	-2,87

Beban pegawai pada Semester II 2021 mengalami penurunan sebesar -2.87% dikarenakan adanya 1 (satu) orang pegawai yang mutasi dan 1 (satu) Orang Pegawai yang pensiun .

Menurunnya beban tunjangan umum karena sudah banyak pegawai yang menduduki fungsional sehingga realisasi tunjangan fungsional menurun.

Selisih antara beban pegawai di LO dengan realisasi belanja pegawai di LRA sebesar Rp.-3.813.910,00 merupakan pengembalian belanja pegawai tahun berjalan karena menduduki jabatan fungsional, dan jurnal penyesuaian atas belanja pegawai yang belum terbayarkan pada tahun 2020 yang terdiri dari Gaji Induk pegawai sebesar Rp2.093.860,00 dan tunjangan fungsional untuk tiga orang sebesar Rp 1.720.050,00.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp187.451.298,00 dan Rp686.239.640,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	149.003.498,00	611.604.040,00	39,23
Beban Persediaan konsumsi	38.447.800,00	60.930.600,00	-22,64
Beban persediaan lainnya	0,00	13.705.000,00	-48,55
Jumlah	187.451.298,00	686.239.640,00	25,99

Besaran pagu untuk untuk belanja persediaan setiap kegiatan mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Pada tahun 2021 belanja bahan utama dan pendukung kegiatan tercatat dalam akun persediaan baik dicatat sebagai bahan baku maupun persediaan lainnya. Namun pada tahun 2021 yang melekat pada akun belanja persediaan hanya berupa Alat Tulis Komputer (ATK). Sehingga beban dari masing-masing jenis persediaan mengalami penurunan

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.664.142.371,00 dan Rp1.309.082.614,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Bahan	76.377.427	92.462.162,00	-17,39
Beban Barang Non Operasional Lainnya	331.604.160	99.012.150,00	234,91
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	218.520.700,00	-100
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	440.270.320	0,00	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	111.890.000	120.060.000,00	-6,80
Beban Honor Output Kegiatan	37.610.000	37.140.000,00	1,26
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	53.979.000	63.750.000,00	-15,32
Beban Jasa Profesi	17595.000	47.400.000,00	-62,87
Beban Keperluan Perkantoran	416.188.740	469.962.260,00	-11,44

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Langganan Air	12.692.050	9.186.450,00	36,35
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	8.966.445	0,00	0,00
Beban Langganan Listrik	87.941.549	89.875.332,00	-2,15
Beban Langganan Telepon	29.857.680	1.113.560,00	2.581,28
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	14.970.000	40.800.000,00	-63,30
Beban Sewa	24.200.000	19.800.000,00	22,22
Jumlah	1.664.142.371,00	1.309.082.614,00	27,11

Beban barang dan jasa pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 27,11%, hal ini dikarenakan adanya penambahan kegiatan PEN yang tidak ada pada tahun 2021. Kemudian tahun 2020 beban atas pembelian bahan utama dan pendukung kegiatan masuk dalam beban persediaan, namun pada tahun 2021 beban atas pembelian bahan utama dan pendukung masuk dalam beban barang non operasional lainnya sehingga mengalami kenaikan mencapai 234,91%. Selain itu yang secara signifikan meningkat adalah beban langganan air mencapai 36,35%, hal ini disebabkan konsumsi atau kebutuhan air meningkat untuk keperluan penyiraman tanaman di pekarangan, dan taman kantor. Kenaikan pada beban telpon dikarenakan adanya penambahan kecepatan internet.

Penurunan beban barang dan jasa yang paling besar terdapat pada Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 100 %, hal ini dikarenakan tidak adanya pagu anggaran pada kegiatan tersebut, sehingga penggunaan anggaran untuk konsumsi dan spanduk atau penggandaan materi lebih rendah. Penurunan beban juga dijumpai di Beban Penambah Daya Tahan Tubuh sebesar -63,30%, hal ini disebabkan pengurangan Pagu anggaran pada kegiatan beban penambah daya tahan tubuh.

Nilai beban belanja barang dan jasa di LO terdapat selisih dengan realisasi belanja barang dan jasa di LRA senilai Rp 1.146.100,00. Selisih tersebut merupakan belanja jasa langganan air kantor tahun 2020 yang belum terbayarkan dan sudah dibayar pada tahun 2021. Kemudian sudah dicatat sebagai jurnal penyesuaian di aplikasi pelaporan SAIBA.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp269.871.256,00 dan Rp175.431.732,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi

normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	99.951.750,00	125.301.500,00	-20,23
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	167.410.353,00	141.387.256,00	18,40
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0,00	988.000,00	-100
Beban Persediaan suku cadang	0,00	2.194.500,00	-100
Jumlah	267.362.103	269.871.256,00	-0,92

Jumlah beban pemeliharaan secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar - 0,92 %, hal ini dikarenakan:

1. Beban untuk pemeliharaan gedung dan bangunan lebih kecil karena tidak banyak dilakukan pemeliharaan terhadap gedung dan bangunan
2. Beban pemeliharaan peralatan dan mesin merupakan beban untuk pemeliharaan kendaraan roda dua sebanyak 4 unit, kendaraan roda empat sebanyak 4 unit, pemeliharaan AC, mesin rumput, mini tiller dan peralatan dan mesin lainnya.
3. Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan dan beban persediaan suku cadang pada tahun 2021 tidak ada karena tidak ada pencatatan belanja di persediaan selain ATK.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp425.174.515,00 dan Rp896.993.267,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	409.444.014	420.924.515,00	-2,72
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.100.000	4.250.000,00	20,00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	209.433.477	0,00	0,00
Jumlah	623.977.491	425.174.515,00	46,75

Beban perjalanan dinas mengalami kenaikan sebesar 46,75% dikarenakan pada tahun 2020 jumlah perjalanan dalam rangka kegiatan terbatas, tidak bisa keluar kota diluar pulau dikarenakan kondisi pandemic Covid-19. Pada tahun 2021 perjalanan ke luar kota dalam satu provinsi masih dapat dilaksanakan, dan dengan adanya kegiatan Penangan Ekonomi Nasional (PEN) yang tidak terdapat pada tahun 2020 menjadikan beban perjalanan meningkat.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp575.228.912,00 dan Rp630.026.694,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	196.450.949,00	196.450.949,00	0
Beban Penyusutan Irigasi	1.926.166,00	1.926.166,00	0
Beban Penyusutan Jaringan	1.214.342,00	1.214.342,00	0
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	703.750	1.407.500,00	-50
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	374.932.849	429.027.737,00	-12,60
Jumlah	575.228.912,00	630.026.694,00	-8,69

Beban penyusutan terhadap aset merupakan hal yang normal karena adanya penyusutan nilai selama masa manfaat dan nilai aset. Terjadinya penurunan beban penyusutan sebesar -8,69% dikarenakan adanya reklas aset tetap dari peralatan dan mesin menjadi aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah.

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	-297.500,00	-100
Beban Persediaan Rusak/Usang	0,00	-20.010.000,00	-100
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	221.400,00	-100
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	725.000	0,00	0
Jumlah	725.000	-20.086.100,00	-103,60

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp15.242.732.134,00 dan Rp14.286.981.619,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp-5.218.404.321,00 dan Rp-5.296.029.450,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.129.271.770,00.

E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp21.669.375,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.495.065.368,00 dan Rp5.122.508.195,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.495.065.368,00
Diterima dari Entitas Lain	-1.565.000,00
Jumlah	4.495.065.368,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2021 saldo DDEL adalah sebesar Rp-1.565.000,00 sedangkan DKEL sebesar Rp4.496.630.368,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp14.519.393.181,00 dan Rp15.242.732.134,00

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

1. Terdapat pegawai tugas belajar 3 orang atas nama Astrid Fransisca, S.T.P., Gomak Ampetua Siregar, S.T.P, dan Faisal Kurnia Harahap
2. Terdapat 6 kali revisi pagu anggaran selama priode Tahun 2021.
3. Terdapat kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dalam kegiatan Penanganan Ekonomi Nasional (PEN)
4. Usulan Penghapusan sudah dibuat sampai tingkat Satker, namu belum bisa diajukan karena adanya kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi dan adanya satu aset yang belum ditemukan keberadaannya.